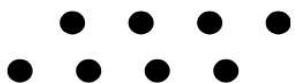


LAPORAN TAHUNAN KINERJA SKI 2025

Oleh:

TIM SKI BBKK DENPASAR



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, Alhamdulillah Laporan Tahunan Kinerja Satuan Kepatuhan Intern (SKI) BBKK Denpasar Tahun 2025 telah selesai disusun sesuai tepat waktu.

Sejak terbentuknya tim SKI BBKK Denpasar diawal 2023, peran SKI mulai diimplemetasikan di setiap Satuan Kerja sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019, tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2019. Demikian halnya dengan Balai Besar Kekearantinaan Kesehatan Denpasar, sudah membentuk Tim Anggota SKI yang tertuang dalam Keputusan Kepala Balai dan sudah mengalami revisi kedua

Penyusunan Laporan Tahunan SKI ini dilakukan oleh Tim Anggota SKI berdasarkan kesesuaian rencana kerja tahunan yang telah dibuat, laporan triwulanan dan lembar kerja evaluasi (LKE) peran SKI.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan SKI ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan sekaligus meningkatkan peran SKI dalam membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselainya penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak terutama di internal BBKK Denpasar.

Denpasar, 13 Januari 2026
Kepala Balai Besar Kekearantinaan Kesehatan
Denpasar



Heri Saputra, SKM, M.Kes
NIP.196905041992031009

LAPORAN KEGIATAN
SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengoptimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka dibentuk Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

SKI adalah perangkat satuan kerja yang ditunjuk/ memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Penyampaian laporan ini merupakan Upaya bagi Satuan Kepatuhan Internal (SKI) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar dalam melakukan evaluasi secara internal terkait dengan efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun 2025.

II. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN

1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen
2. Melakukan evaluasi pelaporan, pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas bidang keuangan, operasional, Sumber Daya Manusia dan kegiatan lainnya.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen.
4. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata Kelola dan upaya strategis.

SASARAN

Sasaran pengawasan dan pengendalian Tahun 2025 adalah :

1. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan (LK)
2. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)
3. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
4. Pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Berikut kami sampaikan hasil pengawasn dan pengendalian tahun 2025

1. Pemantauan dan Evaluasi Laporan Keuangan (LK)

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Lapoaran Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian laporan menjadi tanggung jawab pimpinan entitas.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan BBKK Denpasar, maka dilakukan reviu terhadap laporan keuangan oleh Satuan Kepatuhan Intern (SKI)

Hasil :

1. Pada gambaran ringkas ada kesalahan pengambilan data laporan dan sudah diperbaiki
2. Penulisan redaksional secara keseluruhan agar diperbaiki dan lebih terlitu sesuai EYD

Rekomendasi:

-

2. Pemantauan dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Reviu RKA-KL adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Hasil :

1. Format TOR dengan peraturan terbaru belum sesuai
2. Data dukung ada yang belum lengkap dan ada yang tidak sesuai

Rekomendasi :

-

3. Pemantauan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Hasil :

- LAKIP telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian, dalam mencapai kinerja berikutnya

Rekomendasi :

- Capaian kinerja yang sudah memenuhi target agar dipertahankan.

4. Pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui efektifitas implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong satuan organisasi/kerja di pusat dan daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja.

Hasil :

1. Belum menggambarkan diskusi pengukuran kinerja
2. Rekomendasi dalam laporan berkala belum diupload. Publikasi LAKIP telah dipublikasi namun belum muncul publikasinya.

Rekomendasi :

1. Agar dilakukan diskusi pengukuran kinerja
2. Agar dibuat dan diupload rekomendasi dalam laporan berkala. Agar memunculkan waktu publikasi LAKIP.

5. Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut maka perlu meningkatkan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur dan terdokumentasi dengan

baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Secara umum implementasi pengendalian intern dilaksanakan melalui tahap perencanaan dan pemantauan. Kedua tahapan tersebut merupakan proses yang dijalankan secara terus menerus dan berulang.

Hasil :

- Hasil Penilaian Mandiri (PM) Efektivitas Evaluasi SKI Balai Besar Kekeparantaraan Denpasar tahun 2025 dengan skor hasil Penilaian Mandiri Efektivitas 78,3 % dengan kriteria Efektif.

Rekomendasi :

- Peningkatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen resiko

IV. KESIMPULAN

Dari hasil tindak lanjut dari tahun 2025, maka kita akan fokus pada perbaikan yang telah diidentifikasi. Dengan cara melanjutkan pemantauan dan evaluasi terkait pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan lengkap. Komitmen dalam pemberantasan korupsi akan ditingkatkan dengan memperkuat kebijakan dan mekanisme pengawasan,serta memperbaiki system manajemen resiko dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis pada data yang valid

V. PENUTUP

Laporan ini menggambarkan upaya SKI dalam menerapkan SPIP di Kementerian Kesehatan. Kendala yang dihadapi perlu mendapatkan langkah-langkah perbaikan dan pembaharuan sehingga SKI dapat berfungsi secara optimal.

Tim SKI BBKK Denpasar diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan peran SKI dalam mewujudkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya di BBKK Denpasar. Adanya saran yang inovatif diharapkan guna perbaikan penyusunan laporan tahunan SKI kemudian hari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terimakasih.

Ketua SKI



Gusti Ayu Sri Swandewi,SE

